



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya El Tari, No 52 Telp. (0380) 833145- 832711
KUPANG, KodePos 85118

Kupang, 30 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.3.6/239 /BPAD.1.1

No	Naskah Dinas/ Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan LKPJ Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov.NTT Tahun Anggaran 2025	1 Jepitan	Disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Diterima Tanggal... 11/2/2025
Penerima Linu
Nama Jabatan... Staf

Pengirim
Plt Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Dominikus D. Payong, MA
Pembina Ahli IV/b
NIP.19720513 199201 1 001

PARAF HIRARKI	
Sekretaris BPAD	
Perencana Ahli Muda	
Fungsional Umum	

B. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Asli (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,65%	31,74%	30,21%	Adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kontribusi pengelolaan barang milik daerah terhadap pendapatan daerah.	Meningkatnya belanja Pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintahan.	Terwujudnya NTT bangkit, NTT sejahtera
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD.	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%			
		Persentase Pemanfaatan Aset	73,3 %	100%	100%			
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	73,3 %	100%	71,11 %			

**TARGET PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Daerah	1,242,171,027,017	1,222,852,224,091	98.44%
	Retribusi Daerah	796,500,000	786,120,500	98.70%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
	Lain-lain PAD yang sah	26,611,400,122	16,068,809,348	60.38%
	Jumlah	1,269,578,927,139	1,239,707,153,939	97.65%

(Data Perubahan 2024)

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kebijakan /Kegiatan	(Input/Outcome)	(Input/Outcome)			
1	15	PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.					
		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.					
	03	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000	1.967.984.790	60.91%	- Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah;	-Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan

				keuangan daerah.	
Sub Kegiatan 01.0001					
1. Penyusunan Standar Harga	692.800.000	578.934.080	83.56%	- SK Tim Sertifikasi Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPN Provinsi NTT belum dapat dilaksanakan terkendala proses penandatanganan ;	

Input	80.000.000	76.554.000	95,69%		
Output	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0004					
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Input	55.000.000	29.925.000	54,41%		
Output					
	Kebijakan Pengelolaan barang milik Daerah	Kebijakan Pengelolaan barang milik Daerah		Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0005					
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah					
Input	105.000.000	88.429.000	88,22%		
Output	Laporan penatausahaan barang milik Daerah	Laporan penatausahaan barang milik Daerah			
Outcome	1 Laporan	1 Laporan			
Sub Kegiatan 01.0006					
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah					
Input	262.400.000	6.573.300	2,51%		
Output	Laporan hasil inventarisasi barang milik Daerah	Laporan hasil inventarisasi barang milik Daerah		Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran

					kemampuan keuangan daerah	yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
Sub Kegiatan 01.0007						
6. Pengamanan Barang Milik Daerah						
Input	1.418.100.000	707.928.140	49.92%			
Output	Dokumen pengamanan barang milik daerah	Dokumen pengamanan barang milik daerah			Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
Sub Kegiatan 01.0008						
7. Penilaian Barang Milik Daerah						
Input	105.750.000	85.965.200	81.29%			
Output	Laporan hasil penilaian barang milik Daerah dan Penetapan status	Laporan hasil penilaian barang milik Daerah dan Penetapan status				
Outcome	2 Laporan	2 Laporan				
Sub Kegiatan 01.0009						
8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
Input	210.950.000	152.327.000	72.21%			
Output	Dokumen pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah	Dokumen pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah				

Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0010					
9.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
Input	210.950.000	183.013.800	86.76%		
Output	Dokumen optimalisasi penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Dokumen optimalisasi penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			
Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0011					
10.Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
Input	30.000.000	21.679.900	72.27%		
Output	Laporan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah per Triwulan	Laporan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah per Triwulan			
Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0012					
11. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
Input	30.000.000	23.043.000	76.81%		
Output	Laporan barang milik daerah	Laporan barang milik daerah			
Outcome	2 Laporan BMD	2 Laporan BMD			
Sub Kegiatan 01.0013					

	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Input	30.000.000	13.612.370	45.37%		
	Output	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik Daerah		Pengujian dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan memimimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
04	Outcome	100 orang	100 orang			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		15.032.905.200	13,952,883,996	92.82%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200	13,952,883,996	92.82%		
	Sub Kegiatan 01.0001					
	1.Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					
	Input	80.000.000	68,184,920	85.23%		
	Output	Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah			
	Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Sub Kegiatan 01.0003					
	2.Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah					
	Input	55,000,000	23,485,100	42.70%		

Output	Laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		Pengujian dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Outcome	5 Laporan	5 Laporan			
Sub kegiatan 01.0008					
3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
Input	55,000,000	43,468,420	79.03%		
Output	Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti			
Outcome	13 Laporan	13 Laporan			
Sub kegiatan 01.0009					
4. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
Input	75,000,000	63,020,400	84.03%		
Output	Dokumen hasil verifikasi data pelaporan pajak daerah	Dokumen hasil verifikasi data pelaporan pajak daerah			
Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen			
Sub Kegiatan 01.0010					
Penagihan Pajak Daerah					
Input	13,273,305,200	13,054,660,563	98.35%		

Output	Dokumen tertagihnya WP yang memiliki pajak daerah	Dokumen tertagihnya WP yang memiliki pajak daerah			
	Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen		
	Sub Kegiatan 01.0012 Pengendalian ,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
Input	553,900,000	309,167,563	55.82%		
Output	Laporan pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Laporan pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah		Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Outcome	3 Laporan	3 Laporan			
Sub Kegiatan 01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
Input	940,700,000	390,897,030	41.55%		
Output	Dokumen pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah		Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
Outcome	12 Laporan	12 Laporan			

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Diberlakukan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka upaya meningkatkan penerimaan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dengan menyesuaikan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Ketentuan didalam UU No 1 Tahun 2022.	Pada saat ini telah dilakukan penyesuaian Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan melalui Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perda yang telah disesuaikan tersebut perlu di tindaklanjuti dengan Pergub tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi	- Peningkatan kapasitas dan kinerja pemungutan pajak daerah	Implementasi pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
3	Penerimaan dari Aset Daerah yang dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan pemungutan retribusi daerah - Tata kelola perusahaan hendaknya mengacu pada prinsip good Corporate Governance, yaitu transparansi , akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. - Profesionalisme kepengurusan (Komisaris dan Direksi) perlu ditingkatkan untuk menjamin efisiensi dan optimalisasi penerimaan (laba) - Khusus untuk PT.Bank NTT dan PT.Jamkrida NTT yang kontribusinya terhadap PAD menurun, perlu perbaikan dari sisi praktik bisnis terkait pengendalian biaya dan optimalisasi penerimaan melalui setiap bidang usaha yang dikelola. - Khusus PT.Flobamor dengan ragam usaha yang bervariasi dan anak perusahaan yang banyak, perlu dilakukan retruksurisasi bidang usaha dan merger anak perusahaan ke dalam perusahaan induk, sehingga praktik bisnisnya lebih terfokus dan efisien dari segi pengendalian biaya. 	Aset Daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dipisahkan, dikelola melalui 4 BUMD yaitu PT.Bank NTT, PT.Jamkrida NTT, PT.Fobamor dan PT.KIB.Bolok.

<p>4</p> <p>Penerimaan Lain-lain PAD</p>	<p>Terutama dari Aset Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda).Permasalahan yang dihadapi adalah penerimaan tidak optimal, karena belum semua aset daerah dinilai (appraisal) berdasarkan sesuai harga pasar, sehingga terjadi underestimate terhadap nilai kontrak atau sewa.</p>	<p>Agar dilakukan appraisal terhadap seluruh aset daerah yang tidak dipisahkan, sehingga penentuan nilai kontrak/sewa sesuai dengan harga pasar yang berlaku.</p>
--	--	---

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Badan Pendapatan dan Aset Daerah melaksanakan seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja dan semuanya terlokasikan pada Dokumen Anggaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

- Penerapan pengalihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2)
- Menjalin komunikasi dengan kepolisian untuk menerapkan operasi tertib pajak.
- Membuka Akses Layanan Pembayaran Di Luar Kantor Samsat: Samling, Satgas, Samsat Bundes, Samsat Corner, Samsat On Call dan Pembayaran Lewat Kantor Bank NTT
- Pembayaran Secara Non Tunai Melalui kanal Pembayaran Bank NTT, payment Online /MesineDc (QRIS/ATM Logo GPN)
- Melakukan Upaya Penelusuran Obyek Pajak Melalui Kegiatan Door To Door Menggunakan Aplikasi Samsat Door To Door.
- Pemberian Kebijakan Tax Amnesty
- Pemotongan TPP bagi ASN Lingkup yang terlambat/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor
- Saat ini sementara disiapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan di berlakukan pada Tahun 2025.




2. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

- Meningkatkan kegiatan pengalihan retribusi dan lain-lain PAD yang sah dengan pihak ketiga
- Menyusun regulasi berupa PERDA maupun PERGUB tentang pemanfaatan wilayah konsefasi, pemanfaatan objek retribusi HHBK dan lain-lain.
- Mengoptimalkan penerimaan retribusi pada masing-masing OPD

- Melakukan renegosiasi nilai kontribusi atas sewa aset pemerintah dengan pihak ketiga.
- Mendorong optimalisasi pembayaran deviden oleh BUMD

3. Strategi Pencapaian Target Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan Aset Tahun 2024

- Melakukan penagihan secara rutin kepada mitra kerjasama
- Melakukan publikasi atas aset-aset primer/strategis kepada masyarakat dalam rangka kerjasama pemanfaatan (sewa, BGS, KSP)
- Melakukan appraisal/penilaian atas aset-aset prime.
- Target sesuai Renstra 2018 sampai dengan 2024 sebanyak 294 sertifikat dengan realisasi sertifikat Tahun Anggaran 2018 target 20 realisasi 30, 2019 target 30 realisasi 30, 2020 target 35 realisasi 9, 2021 target 70 realisasi 14 dan 2022 target 75 realisasi 14, serta Tahun 2023 target 30 realisasi 17, Tahun 2024 target 45 realisasi 9 .

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Fungsional Umum	


 NIP. 19720515 19902 1 001
Drs. Donnykus D. Payong, MA
 BALENGGAI

LKPU Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

